

3. Tataran Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan

Urusan Wajib

3.1. Pendidikan

Paradigma penting pembangunan pendidikan didasarkan pada penyelenggaraan yang terjangkau dan bermutu dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan prinsip dasar tersebut tujuan pembangunan pendidikan di Kota Medan adalah meningkat kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif serta menuntaskan program wajib belajar 9 tahun secara optimal, sekaligus memprogramkan tambahan wajib belajar 12 tahun. Melalui pembangunan pendidikan juga diharapkan meningkatnya daya saing masyarakat melalui upaya menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan professional, sehingga memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan secara global dan regional.

Sebagai kewajiban otonomi, maka penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan kota pada tahun 2008. Secara operasional penyelenggaraan urusan pendidikan ini dituangkan dalam beberapa program pokok antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Kantor
- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Pendidikan Luar Sekolah
- Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Untuk mendukung implementasinya, penyelenggaraan urusan pendidikan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 461.595.159.302,- dan belanja langsung sebesar Rp 99.503.100.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp 537.976.074.070,- Berdasarkan pendekatan hasil (*outcome*), capaian kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan Kota Medan selama tahun 2008 dapat dievaluasi melalui 14 (empat belas) indikator kinerja kunci, (IKK) sebagai berikut :

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara).
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C.
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI.
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs.
- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA.
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI.
- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs.
- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA.
- Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs.
- Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA.
- Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV.

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam rangka menciptakan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Kota Medan bersama-sama stakeholder selama tahun 2008 terus menggalakkan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Program ini dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan anak untuk memasuki bangku sekolah.

Berdasarkan jumlah anak usia 4 – 6 tahun di Kota Medan yang diperkirakan mencapai 122.693 orang, maka sebesar 26.222 anak diantaranya telah mendapatkan layanan pendidikan pra sekolah baik pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Anfal (RA) maupun yang diselenggarakan pada tempat penitipan anak. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator pendidikan usia dini di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 21,37% atau sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 22,28%.

Walaupun tingkat capaian kinerja pada tahun 2008 mengalami penurunan, akan tetapi ketersediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan PAUD mengalami peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan untuk jenjang TK/RA telah mencapai 311 sekolah yang terdiri dari 2 sekolah TK Negeri dan 309 TK/RA Swasta. Sedangkan pada tahun 2007, dukungan sarana dan prasarana sebanyak 290

sekolah TK/RA yang tersebar di Kota Medan. Namun demikian secara keseluruhan perluasan, pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini masih sangat diperlukan. Untuk itu selama tahun 2008, Pemerintah Kota Medan telah menyelenggarakan pelatihan kepada tenaga pendidik PAUD sebanyak 400 orang dan melakukan akreditasi kepada 10 sekolah Taman Kanak-Kanak (TK).

b. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Dalam rangka pemberantasan buta aksara di Kota Medan, selama tahun 2008 Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan stakeholder menyelenggarakan pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah terutama pendidikan keaksaraan fungsional. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Kota Medan di atas usia 15 tahun tercatat sebanyak 278.114 jiwa dan dari jumlah tersebut sebanyak 275.806 jiwa yang melek huruf. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator penduduk yang berusia > 15 tahun yang melek huruf sudah mencapai sekitar 99,17% dan sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 99,17%.

Berdasarkan angka capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kota Medan sudah terbebas dari buta huruf dan umumnya mereka yang buta huruf adalah orang yang sudah lanjut usia. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008 untuk menurunkan jumlah buta aksara tersebut adalah melalui kegiatan pendidikan luar sekolah, seperti menyelenggarakan kegiatan Kejar Paket A/B dan pembinaan tutor dengan memberikan bantuan kepada pengelola lembaga dan tutor Paket A sebanyak 60 orang. Sedangkan bantuan Paket B diperuntukan kepada 684 orang bagi pengelola lembaga dan bantuan sebanyak 228 orang kepada tutor. Selain itu, ada juga bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan non formal yang ada di Kota Medan seperti bantuan untuk kelompok keaksaraan fungsional sebanyak 504 orang.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah atau kelompok usia 7 – 18 tahun di Kota Medan dengan formulasi perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada semua jenjang pendidikan pada waktu tertentu.

Pada tahun 2008, jumlah penduduk Kota Medan yang berusia 7 – 12 tahun sebanyak 232.551 orang, sedangkan siswa yang bersekolah pada usia tersebut atau jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 215.202 orang. Dengan demikian pencapaian kinerja dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Medan untuk jenjang SD/MI/Paket A sebesar 92,54% dan angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,75% dibandingkan tahun 2007 yang mencapai sekitar 91,79 %.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang berusia 13 – 15 tahun mencapai 140.778 orang, sedang jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 109.145 orang. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MTs/Paket B di Kota Medan sebesar 77,53%. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 76,18% maka tingkat capaian kinerja APM Kota Medan pada tahun 2008 untuk jenjang SMP/MTs/Paket mengalami peningkatan sebesar 1,35%.

Sementara itu, penduduk Kota Medan yang berusia 16 – 18 tahun berjumlah 134.575 orang dan siswa yang bersekolah dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C berjumlah 88.160 orang. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 65,51%. Jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 64,71% maka tingkat capaian kinerja APM Kota Medan untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 0,8%.

Walaupun tingkat capaian kinerja APM Kota Medan tahun 2008 mengalami peningkatan pada semua jenjang pendidikan, akan tetapi berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan seperti melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah untuk

siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK serta pengadaan sepatu seragam sekolah sebanyak 15.600 pasang untuk SD/MI, 7.200 pasang untuk SMP/MTs dan 6.200 pasang untuk SMA/MA/SMK, terutama bagi siswa/i kurang mampu.

Di samping itu, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan antara lain melakukan rehabilitasi untuk sekolah dasar (SD) sebanyak 10 unit, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 8 unit, sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 2 unit dan rehabilitasi sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 5 unit serta penambahan ruangan kelas baru di SMK Negeri 12 sebanyak 4 ruang.

d. Angka Putus Sekolah (APS)

Salah satu indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan lainnya adalah Angka Putus Sekolah (APS). Pada tahun 2008, persentase APS Kota Medan untuk jenjang SD/MI mencapai 0,21% yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang SD yang mencapai 546 orang dengan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD sebanyak 263.634 orang. Dengan demikian, tingkat APS Kota Medan pada tahun 2008 mengalami penurunan sekitar 0,19% dari tingkat capaian kinerja pada tahun 2007 yang mencapai 0,02%.

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah siswa yang putus sekolah sebanyak 627 orang sedangkan siswa yang bersekolah sebanyak 40.966 orang, sehingga tingkat capaian kinerja pada tahun 2008 untuk indikator Angka Putus Sekolah (APS) sebesar 1,53%. Angka ini relatif meningkat bila dibandingkan dengan tingkat APS pada tahun 2007 yang mencapai 0,05% atau meningkat sebesar 1,48%.

Sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA, jumlah siswa yang putus sekolah sebanyak 1.229 orang atau sekitar 4,49% dari jumlah siswa yang bersekolah. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 0,08% maka tingkat APS Kota Medan tahun 2008 untuk jenjang ini mengalami peningkatan sebesar 4,41%. Meningkatnya persentase APS untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA lebih disebabkan alasan-alasan faktor rumah tangga keluarga.

Upaya penting yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk mengantisipasi terjadinya putus sekolah selama tahun 2008 adalah kebijakan pemberian beasiswa terarah untuk semua jenjang pendidikan, sehingga melalui kebijakan ini diharapkan akan menekan persentase angka putus sekolah di Kota Medan. Di samping itu, adanya bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiah dan satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP.

e. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan menggambarkan banyaknya siswa pada tiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. Pada tahun 2008, angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI dari 39.498 siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir, sebanyak 39.178 siswa yang dinyatakan lulus atau mencapai sekitar 99,18%. Bila dibandingkan dengan tahun 2007, angka kelulusan untuk jenjang SD/MI di Kota Medan sedikit mengalami penurunan yang mencapai 99,21% atau turun sebesar 0,03%.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, angka kelulusan Kota Medan pada tahun 2008 dari 40.916 siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 39.574 siswa dinyatakan lulus ujian dengan tingkat kelulusan mencapai 96,72%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, tingkat kelulusan Kota Medan untuk jenjang SMP/MTs sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,09% dari 96,63% pada tahun 2007.

Sedangkan angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 90,88% dan mengalami penurunan sebesar 4,48% dari angka kelulusan tahun 2008 yang mencapai 95,36%. Penurunan angka kelulusan ini dikarenakan dari 40.531 siswa yang mengikuti ujian akhir, sebanyak 36.834 siswa dinyatakan lulus ujian dan selebihnya sebesar 3.697 siswa dinyatakan tidak lulus atau sekitar 9,12%.

Namun secara umum, rata-rata persentase kelulusan siswa di Kota Medan untuk ketiga jenjang pendidikan tersebut mencapai 95,59% pada tahun 2008 dan bila dibandingkan dengan tahun 2007, rata-rata persentase kelulusan siswa Kota Medan mengalami penurunan sebesar 1,48%. Mengingat tingkat kelulusan siswa Kota Medan mengalami penurunan, Pemerintah Kota Medan telah berupaya untuk meningkatkan persentase angka kelulusan tersebut pada semua jenjang pendidikan melalui program kejar paket B dan C. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas mutu pengajaran telah dilakukan pelatihan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kepada sebanyak 400 orang guru dan pelatihan kurikulum bagi guru bidang studi sebanyak 250 guru.

Di samping itu, Pemerintah Kota Medan melakukan penambahan alat-alat praktek laboratorium kimia untuk SMA dan penambahan alat praktek perbengkelan di SMK serta pengadaan mobiler sekolah sebanyak 65 unit. Sementara itu dari kegiatan pendidikan luar sekolah, Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan ujian nasional paket A, B dan C yang dilaksanakan oleh tim monitoring dengan jumlah peserta paket A sebanyak 18 orang, paket B sebanyak 240 orang dan paket C sebanyak 45 orang.

f. Angka Melanjutkan (AM)

Berkaitan dengan angka kelulusan sekolah, maka indikator relevan lainnya untuk urusan pendidikan adalah angka melanjutkan sekolah (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs maupun dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Berdasarkan data tahun 2008 diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 99,07% yakni dari 39.178 siswa yang lulus pada jenjang SD/MI, sebanyak 38.814 siswa yang melanjutkan sekolah pada jenjang SMP/MTs.

Dibandingkan tahun 2007, tingkat capaian kinerja untuk angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs cenderung mengalami penurunan sebesar 7,94% dari 107,01% pada tahun 2007. Mengingat angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs mengalami penurunan, Pemerintah Kota Medan telah berupaya

meningkatkan angka melanjutkan sekolah dengan memberikan bantuan kepada pengelola dan tutor Paket A sebanyak 60 orang.

Sedangkan untuk indikator angka melanjutkan sekolah (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2008 sebesar 113,07% yakni dari 39.574 siswa yang lulus pada jenjang SMP/MTs dan yang melanjutkan sekolah kejenjang SMA/SMK/MA sebanyak 44.747 siswa. Meningkatnya angka melanjutkan sekolah ini didorong oleh upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008 dengan memberikan bantuan pengelola pada Paket B sebanyak 684 orang dan bantuan kepada tutor paket B sebanyak 228 orang. Di samping itu, Pemerintah Kota Medan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs dan pesantren salafiah serta satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP.

g. Kompetensi Guru

Persentase kompetensi guru menggambarkan angka relatif banyaknya guru yang memenuhi tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki dan kompetensi mengajar dibandingkan dengan jumlah guru yang ada. Pada tahun 2008 jumlah guru di Kota Medan yang berijazah S-1/D-IV sebanyak 16.464 orang atau sekitar 52,60% dari jumlah guru yang ada di Kota Medan sebanyak 31.296 orang. Berdasarkan angka tersebut, tingkat capaian kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV sebesar 52,60%.

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan tersebut, Pemerintah Kota Medan telah melakukan sertifikasi pendidik untuk guru SD, SMP dan SMA/SMK serta menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi berupa MGMP SMK dengan peserta 300 orang guru serta pelatihan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang diikuti 2000 peserta mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.

Di samping itu, untuk meningkatkan kompetensi guru, Pemerintah Kota Medan juga menyelenggarakan pelatihan terhadap 750 orang guru SD, SMP, SMA, SMK dan 270 orang pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK, bekerjasama dengan Universitas Negeri Medan sebagai narasumber

serta menyelenggarakan pemilihan guru berprestasi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK yang diikuti oleh 1.200 guru.

3.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan agar terwujud masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir batin menuju peradaban yang madani dalam menghadapi persaingan global.

Sebagai kewajiban otonomi, maka penyelenggaraan urusan kesehatan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan kota pada tahun 2008. Secara operasional penyelenggaraan urusan kesehatan ini dituangkan dalam beberapa program pokok antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Kantor
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lainnya
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Untuk mendukung implementasi program dan kegiatan tersebut, penyelenggaraan urusan kesehatan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 116.681.215.415,- dan belanja langsung sebesar Rp. 112.264.850.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 201.083.665.262,-

Berdasarkan pendekatan hasil (*outcome*), maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan Kota Medan selama tahun 2008 dievaluasi melalui 8 (delapan) indikator kinerja kunci. Adapun indikator tersebut meliputi :

- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI).
- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA.
- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.
- Cakupan kunjungan bayi.

a. Komplikasi kebidanan yang ditangani

Untuk urusan kesehatan, utamanya menekankan pelayanan kesehatan kepada Ibu hamil, balita dan anak-anak serta masyarakat miskin. Pada tahun 2008, di Kota Medan terdapat kasus ibu dengan komplikasi kebidanan sebanyak 4.673 kasus, dimana 3.379 kasus diantaranya mendapat penanganan secara definitif, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 72,3%. Pencapaian kinerja tahun 2008 tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2007 yang hanya mencapai 23% atau dari 2.096 kasus yang ada dan hanya 483 kasus yang dapat ditangani secara definitif.

Untuk meningkatkan penanganan komplikasi kebidanan, Pemerintah Kota Medan melakukan pembinaan terhadap posyandu, mengadakan lomba posyandu, toga dan kader untuk 21 Kecamatan serta melakukan

revitalisasi posyandu untuk 1.405 posyandu yang tersebar di Kota Medan. Di samping itu, Pemerintah Kota Medan telah melakukan penambahan jasa tenaga medis dan paramedis sebanyak 54 orang.

b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pada tahun 2008, jumlah sasaran ibu bersalin di Kota Medan sebanyak 50.874 orang dan yang ditolong/ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 46.123 orang, sehingga tingkat capaian kinerja untuk indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 90%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, tingkat pencapaian kinerja tahun 2008 relatif hampir sama dengan tingkat capaian kinerja tahun 2007 yang mencapai 90,8% dimana jumlah sasaran ibu bersalin sebanyak 43.413 orang dan yang ditangani/ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 39.453 orang.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan, yakni melalui kegiatan pelatihan APN untuk bidan puskesmas dengan peserta 30 orang, pelatihan PPGDON untuk bidan dengan peserta 22 orang dan pelatihan ASFIKSIA bagi dokter dan paramedis dengan peserta sebanyak 20 orang. Di samping itu, juga dilakukan kegiatan sosialisasi tentang P4K pada ibu-ibu hamil dan penyelenggaraan pelatihan penanggulangan dan pencegahan infeksi bayi baru lahir dengan jumlah peserta 48 orang.

c. Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pada tahun 2008 terdapat 145 Kelurahan dari 151 kelurahan di Kota Medan yang sudah melaksanakan Universal Child Immunization (UCI), sehingga tingkat capaian kinerja untuk indikator cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 96% dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2007.

d. Balita Gizi Buruk

Masalah gizi buruk terutama anak balita sampai saat ini masih merupakan momok bagi penduduk Indonesia tidak terkecuali di Kota Medan. Pada tahun 2008 masih ditemukan 1.527 kasus Balita Gizi

Buruk di Kota Medan dan hanya 550 kasus atau sekitar 36% yang tertangani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2007 yang hanya mencapai 8,7% maka tingkat capaian kinerja tahun 2008 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 27,3% dari tahun sebelumnya.

Pada umumnya kasus balita gizi buruk terjadi pada masyarakat dengan status ekonomi sosial yang rendah. Selain itu, kasus balita gizi buruk juga bisa disebabkan penyakit bawaan dan infeksi. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menekan gizi buruk pada balita di Kota Medan dilakukan melalui penanggulangan gizi buruk untuk 550 balita dan pengadaan vitamin A dan tablet Fe untuk bayi/balita, ibu hamil dan ibu nifas.

Di samping itu, juga dilakukan pemetaan kadarzi dan praktek perilaku pemulihan gizi (KP3G) melalui pendekatan *positive deviance* dan pengumpulan data peningkatan status gizi (PSG) dan PKG di 39 puskesmas serta penyelenggaraan pelatihan UPGK pada PTP2WKSS untuk 35 warga binaan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan MTBS bagi dokter, perawat dan bidan yang diikuti oleh 60 orang peserta serta melakukan pengadaan KMS balita untuk 50.000 balita.

e. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Indikator kunci pelayanan kesehatan lain adalah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA. Di Kota Medan selama tahun 2008 terdapat 1.606 penderita baru TBC BTA(+) dan sebanyak 778 kasus atau sekitar 48,4% yang tertangani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dibandingkan tahun 2007 yang tingkat capaian kerjanya sebesar 81,2% dengan 3.178 penderita baru TBC BTA(+) dan yang dapat ditangani sebanyak 2.579 orang, cenderung terjadi penurunan.

Berdasarkan perbandingan data tersebut, pada tahun 2008 terjadi penurunan jumlah penderita penyakit TBC/BTA, akan tetapi untuk tingkat pencapaian kinerja tahun 2008 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2007. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan adalah melalui sosialisasi tentang penyakit TBC kepada masyarakat dengan peserta 100 orang dan

menyelenggarakan pelatihan kepada petugas TBC di puskesmas pembantu dengan peserta sebanyak 20 orang.

f. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Pada tahun 2008, di Kota Medan ditemukan penderita penyakit DBD sebanyak 1.703 kasus dan semuanya dapat ditangani dengan baik. Sehingga tingkat capaian kinerja untuk penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2007, jumlah penderita penyakit DBD Kota Medan tahun 2008 cenderung menurun dari tahun sebelumnya yakni terdapat 1.917 kasus atau menurun sebesar 11,16%.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan adalah melalui kegiatan fogging pada DBD dalam rangka mencegah penanggulangan DBD pada 2.400 titik fokus dan melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah pada 150.000 anak sekolah serta melaksanakan surveillance epidemiologi penanggulangan DBD sebanyak 20 kasus.

g. Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Selama tahun 2008, terdapat sebanyak 500.000 orang/masyarakat miskin di Kota Medan dan hanya 412.249 pasien miskin yang melakukan kunjungan di sarana kesehatan sehingga tingkat capaian kinerja untuk indikator pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai sebesar 82,4%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, dimana ditemukan 412.249 orang/masyarakat miskin dan hanya 188.279 orang/masyarakat miskin yang melakukan kunjungan untuk berobat ke sarana kesehatan yang ada di Kota Medan atau sekitar 46,0% dari pasien masyarakat miskin.

Berdasarkan data tersebut, tahun 2008 menunjukkan adanya peningkatan jumlah orang/masyarakat miskin di Kota Medan sekitar 21,28% dari tahun sebelumnya. Sedangkan keinginan orang/masyarakat miskin yang melakukan kunjungan berobat di sarana kesehatan cenderung meningkat dari 188.279 pasien pada tahun 2007 menjadi 412.249 pasien pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 118,96%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tahun 2008 yang mencapai

82,4% menunjukkan peningkatan yang lebih baik bila dibandingkan tahun 2007 yang hanya 46,0%.

Walaupun relatif menunjukkan kinerja yang tepat lebih baik, tetapi Pemerintah Kota Medan tetap berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Medan melalui kegiatan supervisi ASKESKIN untuk 53 sarana Yankes, melaksanakan JPKMS kepada masyarakat dengan jumlah peserta 500.000 jiwa dan melakukan pembinaan sarana pelayanan kesehatan swasta sebanyak 369 yang terdiri dari 69 rumah sakit, 115 rumah bersalin, 15 laboratorium kesehatan dan sebanyak 120 balai pengobatan serta 50 Optik di Kota Medan. Sedangkan upaya pembinaan untuk perizinan seluruh jenis sarana kesehatan dilakukan kepada 1.200 sarana Yankes.

Sementara itu, untuk meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kota Medan, dilakukan pemeliharaan alat-alat kesehatan/kedokteran/laboratorium sebanyak 12 unit alat, merehabilitasi gedung puskesmas pembantu untuk 3 unit, merehabilitasi gedung puskesmas untuk 8 unit dan merehabilitasi gedung puskesmas pembantu untuk 1 unit.

h. Kunjungan Bayi

Indikator penting lainnya di bidang pelayanan dasar kesehatan adalah bayi lahir hidup. Selama tahun 2008 terdapat 46.244 bayi lahir yang hidup di Kota Medan dan sebanyak 41.623 mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar, sehingga tingkat capaian kinerja untuk cakupan kunjungan bayi yang mendapat pelayanan dasar kesehatan mencapai 90%. Dibandingkan tahun 2007, dimana terdapat 41.346 bayi lahir yang hidup di Kota Medan dan hanya sebanyak 35.311 bayi yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar atau sekitar 85,4%.

Berdasarkan data tersebut, tingkat pencapaian kinerja tahun 2008 untuk indikator kunjungan bayi mengalami peningkatan dari 85,4% pada tahun 2007 menjadi 100% pada tahun 2008. Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan adalah melalui kegiatan pembinaan petugas kesehatan dalam melaksanakan patroli kesehatan dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang.

3.3. Lingkungan Hidup

Meningkatnya aktifitas pembangunan di berbagai sektor, di samping berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup termasuk diantaranya adalah potensi timbulnya dampak pencemaran lingkungan baik udara, laut maupun tanah. Hal ini sebagai akibat adanya eksploitasi sumber daya yang adakalanya kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, maka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kota Medan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 23.886.999.617,- dan belanja langsung sebesar Rp. 113.982.481.460,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp 83.375.710.015,-

Sebagai kewajiban otonomi, maka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan kota pada tahun 2008. Secara operasional penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ini dituangkan dalam beberapa program pokok antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Program Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan lingkungan hidup digunakan 4 (empat) indikator kinerja kunci, yaitu :

- Penanganan sampah.
- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.
- Penegakan hukum lingkungan.

a. Penanganan Sampah

Penanganan sampah merupakan permasalahan krusial yang sering dihadapi kota-kota di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Medan. Pada tahun 2008, total produksi sampah Kota Medan sebesar 840.000 m³/hari dan volume sampah yang baru tertangani sebesar 734.690 m³/hari. Berdasarkan data tersebut maka capaian kinerja indikator persentase penanganan masalah sampah di Kota Medan telah mencapai 87,4% sehingga relatif lebih besar dari tingkat capaian kinerja tahun 2007 yang mencapai sekitar 70,8%.

Dalam rangka penanganan masalah sampah tersebut, Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008 melakukan pengadaan truck tipper sampah sebanyak 29 unit, pengadaan Arm Roll truck 10 M³, pengadaan tong sampah (*Dust Bin*) dan pengadaan becak dan gerobak sampah. Di samping itu, Pemerintah Kota Medan juga melakukan pemantauan kualitas lingkungan di dua tempat TPA, yakni Namo Bintang & Terjun.

b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Untuk tahun 2008, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Medan telah mencapai 100%, dimana semua perusahaan yang wajib melaksanakan AMDAL di Kota Medan yang berjumlah 19 perusahaan telah dilaksanakan pengawasannya. Dengan demikian tingkat capaian kinerja untuk pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Medan sebesar 100%.

c. Rasio Tempat Pembuangan Sampah

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk merupakan perbandingan antara daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebesar 6.000 m³ dengan jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2008 sebanyak 2.102.105 jiwa. Berdasarkan data tersebut, pencapaian kinerja dari indikator rasio tempat pembuangan sampah per satuan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebesar 0,0028% dan relatif sama dengan tingkat capaian kinerja pada tahun 2007.

Berdasarkan tingkat capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kota Medan telah berupaya melakukan kerjasama dalam pengelolaan persampahan melalui penyewaan alat berat sebanyak 3 unit, yang digunakan untuk

memapar sampah di TPA. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 maka Pemerintah Kota Medan melakukan sosialisasi masalah persampahan kepada masyarakat melalui media massa elektronik dan pencetakan striker.

Kegiatan ini bertujuan agar sampah dari masyarakat dapat dikurangi dari sumbernya dan dapat dijadikan barang yang komersil (daur ulang).

d. Penegakan Hukum Lingkungan

Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan pengaduan kasus pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup, maka digunakan indikator kunci penegakan hukum lingkungan. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup maka Pemerintah Kota Medan telah melakukan pemantauan terhadap titik sampling dari 50 (lima puluh) pelaku usaha dan/atau kegiatan atau *stakeholder* dalam rangka pemantauan untuk memenuhi baku mutu lingkungan (BML) dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.

3.4. Pekerjaan Umum

Dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi daerah, prasarana jalan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan berkembangnya distribusi produk dan aksesibilitas masyarakat. Bidang pekerjaan umum tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dari infrastruktur jalan dan PJU, pengairan, sistem drainase, sistem air bersih, pengelolaan limbah (sampah), sarana pendidikan dan kesehatan. Pembangunan bidang pekerjaan umum ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sosial budaya dan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Sebagai kewajiban otonomi, maka penyelenggaraan urusan pekerjaan umum menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong–Gorong
- Program Pembangunan Trotoar
- Program Pembangunan Drainase
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Implementasi penyelenggaraan urusan pekerjaan umum selama tahun 2008, didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 7.395.325.866,- dan belanja langsung sebesar Rp. 86.713.200.400,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 89.259.037.194,73,-

Tingkat capaian kinerja indikator kunci untuk urusan pekerjaan umum diamati melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu :

- Panjang jalan kota dalam kondisi baik.
- Rumah tangga bersanitasi.
- Kawasan kumuh.

a. Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik

Indikator kinerja kunci untuk panjang jalan kota dalam kondisi baik dapat diketahui dengan membandingkan panjang jalan Kota Medan dalam kondisi baik dengan panjang seluruh jalan Kota Medan. Pada tahun 2008, panjang jalan Kota Medan dalam kondisi baik untuk status jalan kota dan jalan provinsi sepanjang 2.045,16 km, sedangkan panjang seluruh jalan Kota Medan 2.951,38 km.

Berdasarkan data tersebut maka tingkat capaian kinerja untuk indikator panjang jalan kota dalam kondisi baik sebesar 69,29%. Tingkat capaian kinerja tahun 2008 tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 66,29%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008, Pemerintah Kota Medan telah berupaya untuk meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan jalan kota yang ada di wilayah Kota Medan.

Selama tahun 2008, Pemerintah Kota Medan telah menyelesaikan pembangunan jalan seluas 481.355 m², pembangunan trotoar sepanjang

4.270 m dan rekonstruksi jembatan sebanyak 1 unit serta pembangunan Turap/Talud/Bronjong di 18 lokasi sepanjang 7.123 m.

Selain itu, upaya yang dilakukan adalah merehabilitasi/pemeliharaan jalan itu, upaya yang dilakukan adalah merehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan seluas 115.114,56 m² merehabilitasi/pemeliharaan Tuap/Talud/Bronjong sepanjang 53.927,60 m.

Implementasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pekerjaan umum selama tahun 2008 berdampak pada semakin meningkatnya dan terpeliharanya jalan kota dalam kondisi yang lebih baik menjadi seluas 596.469.56 m² dan trotoar sepanjang 4.270 m serta jaringan drainase sepanjang 61.050,60 m sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir sedini mungkin yang terjadi di Kota Medan.

b. Rumah Tangga Bersanitasi

Indikator kinerja kunci rumah tangga bersanitasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang bersanitasi dengan jumlah total rumah tangga. Untuk tahun 2008, jumlah rumah tangga yang telah bersanitasi di Kota Medan berjumlah 321.856 KK, sedangkan jumlah rumah tangga di Kota Medan sebanyak 470.481 KK.

Berdasarkan data tersebut, maka tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator rumah tangga yang bersanitasi pada tahun 2008 baru sebesar 68,40% dan relatif sama dengan tingkat capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2007. Untuk itu, Pemerintah Kota Medan selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang telah bersanitasi melalui renstra sanitasi Kota Medan yang telah tersedia sebagai pedoman pelaksanaan sanitasi di Kota Medan.

c. Kawasan Kumuh

Indikator kinerja kunci untuk kawasan kumuh merupakan perbandingan antara luas kawasan kumuh dengan luas wilayah. Pada tahun 2008, di Kota Medan terdapat kawasan kumuh yang menyebar di 151 Kelurahan dengan luas yang diperkirakan mencapai 881,66 Ha, sedangkan luas wilayah Kota Medan sendiri seluas 26.510 Ha. Berdasarkan perbandingan tersebut maka tingkat capaian kinerja untuk

persentase kawasan kumuh di Kota Medan sebesar 3,32% atau mengalami peningkatan dari 0,64% pada tahun 2007 dengan kawasan kumuh seluas 17.000 Ha.

Untuk memperbaiki kondisi dan penataan pada daerah kumuh tersebut, selama tahun 2008 Pemerintah Kota Medan telah berupaya menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana dasar untuk lingkungan berbasis masyarakat (NUSSP) dan penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perumahan dan permukiman (Rusunawa II dan III serta timbunan Rusunawa IV). Sedangkan untuk rancangan terintegrasi telah disusun Renstra sanitasi Kota Medan sebagai pedoman pelaksanaan sanitasi di Kota Medan pada masa mendatang.

3.5. Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan penataan ruang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan penataan ruang ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Sebagai upaya untuk menjaga dan menata tata ruang perkotaan, maka penyelenggaraan urusan penataan ruang Kota Medan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.731.661.600,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.109.160.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 8.118.966.149,-.

Untuk mengetahui indikator capaian kinerja kunci untuk urusan tata ruang dapat diketahui melalui perbandingan antara Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan pada tahun 2008 luasnya mencapai 110,69 Ha. Sedangkan luas wilayah Kota Medan yang ber-HPL/HGB mencapai 6.628 Ha. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka capaian kinerja kunci untuk urusan tata ruang sebesar 1,67%. Nilai tersebut diperoleh atas dasar estimasi RTH termasuk luas lahan yang belum dimanfaatkan (kosong) dengan Ruang Terbuka Hijau Privat.

Pada masa mendatang, pengelolaan ruang di kawasan perkotaan cenderung mengalami tantangan berat sebagai akibat dari tingginya arus urbanisasi. Sementara di sisi yang lain, daya dukung lingkungan dan sosial mengalami penurunan sehingga tidak mampu mengimbangi kebutuhan tekanan kependudukan. Tantangan lainnya berkaitan dengan tingginya tingkat konversi atau alih guna lahan terutama dalam bidang pertanian maupun terbuka hijau menjadi daerah terbangun yang menimbulkan dampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, seperti seringnya terjadi banjir, polusi udara dan meningkatnya kerawanan sosial serta menurunnya produktifitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial semakin sempit.

Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan adalah :

1. Analisis data/informasi tentang pengelolaan RTH dengan tujuan untuk memudahkan inventarisasi RTH dan pemasangan papan reklame yang ada di seluruh Kota Medan serta menginformasikan keadaan dan wilayah yang strategis yang dapat dikelola sebagai RTH.
2. Melaksanakan penghijauan di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Helvetia, Medan Belawan Bagan 1, Medan Belawan

Bagan 2, Medan Tuntungan, penghijauan di Perumnas Martubung, kompleks Wartawan, kompleks DPRD (Cemara), Medan Selayang dan Medan Denai.

3. Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang berupa penyusunan rencana detail pada 7 (tujuh) kecamatan yang akan dilanjutkan dengan 14 (empat belas) kecamatan yang belum.
4. Melakukan upaya-upaya peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan perawatan RTH seperti peran dari perusahaan, kompleks perumahan dan masyarakat secara individu dalam menata perkarangan rumahnya.

3.6. Perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan yang berorientasi pada pendekatan partisipatif. Kebijakan ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh stakeholders.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Data/Informasi
- Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Implementasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan Kota Medan selama tahun 2008, didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.335.913.627,- dan belanja langsung sebesar Rp. 7.766.232.050,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 6.837.977.310,-

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja kunci urusan perencanaan pembangunan diamati melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA.
- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.
- Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.

Berdasarkan indikator di atas, untuk dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan masih dalam pembahasan bersama-sama dengan DPRD Kota Medan, Namun dalam pelaksanaannya telah diturunkan ke dalam rencana yang lebih singkat (menengah) dengan tetap mengacu kepada RPJP nasional. Sebagai pedoman maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan untuk tahun 2006 – 2010 telah diatur dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2005. Dengan kata lain, pencapaian kinerja untuk indikator kinerja kunci tentang tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan di Kota Medan terpenuhi. Di samping itu, untuk RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 050/4953/Bappeda/2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2008.

3.7. Perumahan

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut perlu keterlibatan semua pihak baik masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Adanya ketidakselarasan masing-masing sektor di atas dapat memberikan dampak, yakni meluasnya lahan tidur di kawasan perkotaan, maraknya spekulasi tanah, tidak seimbang

pembangunan desa dan kota dan maraknya permasalahan sosial kemasyarakatan terutama di perkotaan serta tumbuhnya kawasan kumuh.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan perumahan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan perumahan ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- Program Lingkungan Sehat Perumahan (DAK)
- Program Lingkungan Sehat Perumahan (BDB)
- Program Lingkungan Sehat Perumahan (Dana Penyesuaian)
- Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sebagai upaya untuk mendukung implementasi penyelenggaraan urusan perumahan Kota Medan selama tahun 2008, maka didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.212.675.945,- dan belanja langsung sebesar Rp.5.575.646.000,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp.8.221.613.828,-

Indikator capaian kinerja kunci untuk urusan perumahan dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator utama, yaitu :

- Rumah Tangga yang menggunakan air bersih.
- Luasan lingkungan permukiman kumuh.
- Rumah layak huni.

a. Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Akses terhadap air bersih merupakan salah satu indikator dari masyarakat yang sehat dan sejahtera. Sistem air bersih yang baik akan menghasilkan manfaat ekonomi, melindungi lingkungan hidup dan vital bagi kesehatan manusia. Untuk menilai indikator capaian kinerja untuk rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah rasio antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan seluruh jumlah rumah tangga yang ada di wilayah tertentu.

Pada tahun 2008, jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Kota Medan diperkirakan sebanyak 470.481 KK dan sebanyak 321.856 KK diantaranya merupakan pengguna air bersih, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 68,40% dan keseluruhannya merupakan pelanggan dari PDAM Tirtanadi Kota Medan. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2008 tidak mengalami perkembangan berarti dibandingkan tahun 2007.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Medan telah melakukan kegiatan pembangunan sumur BOR (*Deep Well*) dan menyediakan BOP Sumur Bor serta BOP SANIMAS, menyediakan sanitasi untuk masyarakat di 2 (dua) lokasi, menyediakan prasarana air limbah di kawasan RSH /rumah susun di 2 (dua) lokasi dan penyediaan sarana air limbah di pusat Kota Medan serta penyediaan jaringan pipa distribusi di Kota Medan sebanyak 3543 SR yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dan PDAM Tirtanadi.

b. Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh

Laju urbanisasi yang tiap tahun semakin meningkat berdampak pada menjamurnya rumah-rumah kumuh di kawasan perkotaan, sehingga cenderung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh tersebut serta mempengaruhi kualitas lingkungan dan kawasan. Berdasarkan indikator capaian kinerja untuk indikator luasan lingkungan permukiman kumuh di Kota Medan terdapat 881,66 Ha dari luas wilayah Kota Medan. Luasan lingkungan permukiman kumuh tersebut setara dengan 3,32% dari luas Kota Medan, sehingga tingkat capaian kinerja kunci untuk persentase luasan lingkungan kumuh di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 3,32 %. Dengan demikian, tingkat

capaian kinerja tahun 2008 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2007.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi masalah lingkungan permukiman kumuh tersebut, yakni diantaranya melalui penyediaan sanitasi dan MCK++ dan IPAL pada 1 (satu) lokasi dan melakukan pembangunan sarana dan prasarana jalan lingkungan sebanyak 1.269 lokasi.

c. Rumah Layak Huni

Indikator rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah tertentu. Berdasarkan data tahun 2008, jumlah seluruh rumah yang ada di Kota Medan diperkirakan sebanyak 262.999 unit dan sebanyak 228.020 rumah adalah rumah layak huni. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator rumah layak huni di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 86,7% dan relatif tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2007.

Untuk mengatasi masalah kebutuhan rumah layak huni tersebut, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan adalah melakukan pembangunan fasilitas berupa sarana dan prasarana dasar lingkungan yang berbasis masyarakat (NUSSP) dengan melaksanakan BOP NUSSP di Kota Medan serta penyusunan dokumen rencana pembangunan perumahan permukiman daerah di Kota Medan untuk masa mendatang.

3.8. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan kepemudaan dan olahraga diupayakan untuk membangun karakter dan kehidupan berbangsa serta sekaligus untuk mengantisipasi merebaknya pemakaian napza di kalangan pemuda.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sebagai upaya untuk mendukung implementasi penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga selama tahun 2008, maka didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.230.922.174,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.033.048.000,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 3.236.166.457,-.

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga digunakan 2 (dua) indikator kinerja kunci, yaitu :

- Jumlah gelanggang/balai remaja (selain swasta) per 1000 penduduk.
- Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk.

a. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja

Untuk jumlah gelanggang/balai remaja di Kota Medan terdapat sebanyak 4 buah dan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Medan yang berjumlah 2.102.105 jiwa, maka rasio per seribu penduduk untuk indikator jumlah gelanggang/balai remaja sebesar 0,0004. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator jumlah gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk adalah sebesar 0,0004.

Hal ini menunjukkan masih sangat minimnya jumlah gelanggang/balai remaja yang tersedia. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008 adalah melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, seperti pembangunan sarana olahraga multifungsi yakni untuk bola voli dan bulutangkis di Jl. Tempirai 5 Griya Martubung Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan.

b. Rasio Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga yang terdapat di Kota Medan sebanyak 233 buah yang tersebar di 21 kecamatan. Dengan jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.102.105 jiwa maka rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk sebesar 0,10%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih sangat minimnya ketersediaan lapangan olahraga di Kota Medan.

Dengan keterbatasan yang dimiliki tersebut, Pemerintah Kota Medan tetap berupaya untuk meningkatkan prestasi di bidang kepemudaan melalui :

1. Seleksi dan pengiriman pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) sebanyak 66 orang peserta terpilih sebagai wakil Kota Medan untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
2. Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor sebanyak 3 orang pemuda terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Sumatera Utara.
3. Pembinaan organisasi kepemudaan yang diikuti oleh 84 peserta yang berasal dari 21 kecamatan di Kota Medan yang pesertanya terdiri dari guru SMP, guru SMA, anggota TNI dan POLRI.
4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) peserta yang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok peserta dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Medan, kelompok peserta dari pemuda yang diwakili oleh 21 (duapuluh satu) kecamatan di Kota Medan dan kelompok peserta dari gerakan pramuka.

Sedangkan untuk pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain :

1. Melakukan kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya yang diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
2. Melaksanakan pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah untuk POPDASU yang diikuti 75 (tujuh puluh lima) atlet pelajar Kota Medan dan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari. Hal ini dilaksanakan dalam rangka persiapan untuk mengikuti pekan olahraga pelajar

- daerah propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat.
3. Melakukan pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah untuk POSPEDASU yang diikuti 90 (sembilan puluh) atlet pelajar pondok pesantren se-Kota Medan yang dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari. Hal ini dipersiapkan untuk mengikuti pekan olahraga siswa pondok pesantren Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal.
 4. Melakukan pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah untuk POPWIL (Pekan Olahraga Wilayah Sumatera) yang diikuti oleh 70 (tujuh puluh) atlet se-Kota Medan yang dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari. Hal ini dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Wilayah Sumatera di Propinsi Kepulauan Riau di Batam.
 5. Menyelenggarakan kompetisi olahraga tingkat junior/kader yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari dengan mempertandingkan 3 (tiga) cabang olahraga, yaitu tinju, taekwondo dan tenis meja.
 6. Menyelenggarakan kompetisi olahraga antar klub/perkumpulan yang dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari dengan mempertandingkan 2 (dua) cabang olahraga, yaitu bulutangkis dan pencak silat.
 7. Menyelenggarakan kompetisi olahraga terbuka (Open Tournament) yang dilaksanakan selama 29 (dua puluh sembilan) hari dengan mempertandingkan 4 (empat) cabang olahraga, yaitu tinju, bola voli, panjat tebing dan bowling.
 8. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih olahraga (TOT) yang dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari, yang diikuti oleh 250 (dua ratus lima puluh) pelatih olahraga yang terdiri dari 5 (lima) cabang olahraga, yaitu karate, gulat, pencak silat, bola voli dan senam.

3.9. Penanaman Modal

Pembentukan daya tarik investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor baik primer maupun sekunder. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan serta sosial dan budaya diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya tarik investasi ke suatu negara atau daerah. Secara umum investasi atau penanaman modal membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan

prosedur penanaman modal, di samping kondisi makro ekonomi daerah yang stabil.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan penanaman modal ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sebagai upaya untuk mendukung implementasi penyelenggaraan urusan penanaman modal Kota Medan selama tahun 2008, maka didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 981.466.375,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.022.032.000,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.482.117.910,-.

Indikator kunci untuk urusan penanaman modal diukur berdasarkan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah). Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Medan selama tahun 2008 mencapai 60,96 milyar rupiah. Apabila dibandingkan dengan realisasi penanaman modal dalam negeri tahun 2007 yang mencapai 350,05 milyar rupiah, maka terjadi penurunan realisasi penanaman modal dalam negeri di Kota Medan sebesar 82,5%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami penurunan nilai realisasi pada tahun 2008 sebesar 82,5%.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan menarik minat para investor untuk berinvestasi di Kota Medan adalah melalui penyelenggaraan pameran investasi di Pekan Raya Sumatera Utara pada Tanggal 19 Maret 2008 s/d 15 April 2008 bertempat di Tapian Daya Medan, Invesda Expo pada Tanggal 7 s/d 10 Agustus 2008 di Jogja Expo Center

Yogyakarta, Sumatera Utara Expo II pada Tanggal 18 s/d 21 Desember 2008 di Kartini Expo Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta dan Medan Fair pada Tanggal 5 s/d 21 Desember 2008 di Stand Pemko Medan PRSU Tapian Daya Medan, serta kunjungan pameran Sumatera Expo pada Tanggal 7 s/d 20 November 2008 di Gedung Pusat Promosi Sumatera Batam.

Di samping itu, Pemerintah Kota Medan juga melakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dengan melakukan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kota Medan pada tanggal 23 Desember 2008 di Hotel Dharma Deli Medan.

3.10. Koperasi dan UKM

Perkembangan koperasi di Kota Medan tidak lepas dari pembinaan Pemerintah Kota Medan dalam berbagai hal baik berupa penyuluhan, pemberian bantuan termasuk pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dapat mengerakkan usahanya secara sehat sehingga mampu meningkatkan kedudukan, fungsi dan perannya dalam membangun perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tersebut, penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM Kota Medan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 1.748.198.690,-**

dan belanja langsung sebesar **Rp. 811.016.000,-** dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar **Rp. 2.367.587.870,-**.

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Koperasi dan UKM digunakan 2 (dua) indikator kinerja kunci, yaitu :

- Persentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi.
- Persentase usaha mikro dan kecil.

a. Jumlah Koperasi Aktif

Pada tahun 2008, jumlah koperasi yang ada di Kota Medan seluruhnya berjumlah 1.857 buah. Dari sejumlah koperasi tersebut, terdapat 915 buah koperasi yang aktif atau sekitar 49,27%. Berdasarkan data tersebut, tingkat capaian kinerja kunci untuk persentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi di Kota Medan sebesar 49,27% dan tingkat capaian kinerja tahun 2008 ini relatif tidak mengalami perubahan dengan tahun 2007.

Dilihat dari sisi capaian kinerja, kondisi tersebut menggambarkan masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif. Untuk itu, Pemerintah Kota Medan tetap berupaya menumbuhkan dan menggairahkan sektor perkoperasian melalui beberapa kegiatan, diantaranya :

1. Memfasilitasi keikutsertaan koperasi dan UKM dalam berbagai pameran yang diselenggarakan di dalam maupun di luar daerah seperti Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan Smesco yang menampilkan pameran produk unggulan dari UMK dengan tujuan untuk mendorong kontak dagang antar pelaku usaha (KUKM) dengan pengunjung.
2. Menyelenggarakan sosialisasi tentang prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian kepada 60 orang anggota/calon anggota koperasi.
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penghargaan kepada 50 koperasi berprestasi.
4. Menyelenggarakan temu usaha koperasi, UKM dan koperasi besar yang diikuti 60 koperasi sehingga terjalin kemitraan secara sinergis.
5. Menyelenggarakan pelatihan manajemen tentang pengelolaan administrasi keuangan koperasi kepada 300 orang pengurus koperasi.

6. Melakukan pengklasifikasian koperasi untuk mengetahui perkembangan 200 KSP/USP.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi koperasi serta pemutakhiran data terhadap 375 koperasi di Kota Medan sebagai bahan pembinaan pada masa yang akan datang.

b. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah UMKM di Kota Medan pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 160.000 usaha, dan dari jumlah tersebut sebanyak 24.465 usaha adalah merupakan usaha mikro dan kecil yang tersebar di wilayah Kota Medan. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Medan sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Medan pada tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai sekitar 90,58%.

Penurunan ini disebabkan semakin meningkatkan omset jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) sehingga bergeser menjadi kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).

Sebagai basis perekonomian kerakyatan yang mampu berusaha secara mandiri, maka Pemerintah Kota Medan tetap melakukan upaya peningkatan fungsi dan peranan UMK di Kota Medan, antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi untuk dukungan informasi permodalan kepada 40 UKM dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam mengakses permodalan.
2. Menyelenggarakan pameran investasi koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) tahun 2008 di Plaza Medan Fair dalam rangka menunjang pemasaran hasil produk unggulan KUKM yang ada di Kota Medan.
3. Melaksanakan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada 20 pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta memberikan sertifikasi merk bagi produk UKM tersebut.
4. Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan manajemen usaha kepada 200 orang pengusaha yang bergerak pada industri rumah tangga dan industri kecil menengah.
5. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan kepada 120 orang pelaku usaha kecil menengah (UKM).

3.11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus membangun citra positif aparatur pemerintah maka Pemerintah Kota Medan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal dengan berbagai program dan kegiatan. Untuk urusan kependudukan dan catatan sipil diarahkan untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Urusan ini menjadi sangat penting, karena banyak fungsi vital negara berkaitan dengan hak kewarganegaraan seseorang baik menyangkut penerbitan surat-surat kependudukan maupun akta catatan sipil.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung implementasi program dan kegiatan tersebut, penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Medan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.201.046.358,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.647.192.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 4.777.696.675,-

Sementara itu, untuk mengetahui capaian kinerja indikator kunci urusan kependudukan dan catatan sipil diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu :

- Persentase kepemilikan KTP.
- Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk.
- Penerapan KTP nasional berbasis NIK.

a. Persentase Kepemilikan KTP

Pada tahun 2008, penduduk Kota Medan yang seharusnya memiliki KTP diperkirakan sebanyak 2.031.370 jiwa, akan tetapi jumlah penduduk

yang baru memiliki KTP saat ini berjumlah 1.732.118 jiwa atau sebesar 85,27% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP. Berdasarkan data tersebut maka tingkat capaian kinerja untuk persentase kepemilikan KTP di Kota Medan sebesar 85,27% dan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan dalam mencatatkan kependudukannya sudah cukup memadai dan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya mencapai 80,69%.

Tumbuhnya kesadaran masyarakat Kota Medan untuk memiliki KTP ini tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan di 151 kelurahan dalam rangka pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu di Kota Medan serta memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat untuk pelayanan kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan Instruksi Walikota Medan tentang pelayanan tanpa bayar.

b. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Untuk mengukur capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran dihitung berdasarkan proporsi dari jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dengan jumlah penduduk Kota Medan. Pada tahun 2008, penduduk Kota Medan yang memiliki akta kelahiran sebanyak 39.538 orang, sedangkan jumlah penduduk Kota Medan sebesar 2.102.105 orang. Berdasarkan rasio tersebut maka diperkirakan hanya sekitar 18,80% penduduk Kota Medan yang telah memiliki akta kelahiran.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja kunci untuk persentase kepemilikan akta kelahiran di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 18,80%. Hal ini memberi arti bahwa setiap per seribu orang penduduk di Kota Medan baru sekitar 19 orang yang telah memiliki akta kelahiran. Namun tingkat pencapaian kinerja tahun 2008 ini sudah lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya mencapai sekitar 12,77%. Hal ini disebabkan karena masyarakat sampai saat ini masih menganggap bahwa akta kelahiran belum sepenuhnya dirasakan penting. Namun demikian, untuk waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, tingkat partisipasi masyarakat untuk mencatatkan peristiwa penting yang

dialaminya (kelahiran) mencapai 85% yang merupakan perbandingan antara akta kelahiran yang diterbitkan dengan jumlah kelahiran yang ada.

c. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Kebijakan Pemerintah melalui Dirjen Adminduk untuk penerapan KTP berbasis NIK melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sampai tahun 2008 belum dapat dilaksanakan di Kota Medan. Kota Medan sendiri dalam penerapan KTP masih menggunakan Simduk. Akan tetapi pada tahun 2008, Kota Medan telah menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai program nasional untuk diterapkan di tingkat pemerintah kecamatan dan kelurahan.

3.12. Ketenagakerjaan

Kebijakan pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kota Medan diarahkan pada pelatihan dan keterampilan untuk mencetak tenaga kerja yang terlatih dan profesional guna memenuhi permintaan pasar tenaga kerja dan untuk menaikkan taraf kesejahteraan tenaga kerja.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Pembinaan Hubungan Industri yang standard/ideal
- Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tersebut, penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan Kota Medan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.607.963.782,-

dan belanja langsung sebesar Rp. 1.242.032.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 4.261.208.732,-

Untuk mengukur capaian kinerja kunci urusan ketenagakerjaan dinilai melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu :

- Tingkat partisipasi angkatan kerja.
- Persentase pekerja yang di tempatkan.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ketersediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan syarat yang diperlukan oleh suatu daerah untuk berkembang. Untuk itu ketersediaan tenaga kerja di suatu daerah didasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja atau produktif, yakni penduduk yang berusia antara 15 sampai 64 tahun.

Pada tahun 2008, jumlah penduduk usia produktif di Kota Medan sebanyak 1.532.871 jiwa, sedangkan jumlah penduduk angkatan kerja berjumlah 959.309 jiwa. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 62,58%. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2008 ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2007 yang hanya mencapai sekitar 58,62%.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah melalui penyuluhan dan bimbingan kepada pencari kerja dan calon angkatan kerja serta meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan pasar tenaga kerja di Kota Medan dan memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja yang terlatih untuk kejuruan las, kejuruan teknisi komputer, kejuruan sepeda motor serta meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja dibidang elektronika kejuruan teknisi AC, kulkas dan HP.

b. Persentase Pekerja yang di Tempatkan

Berdasarkan data pada tahun 2008, terdapat 9.574 orang tenaga kerja yang telah ditempatkan atau telah mendapat pekerjaan.

Sedangkan jumlah pekerja yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2008 sebanyak 16.555 orang. Berdasarkan data tersebut maka tingkat capaian kinerja kunci untuk persentase pekerja yang ditempatkan di Kota Medan sebesar 57,83% dan apabila dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 51,07% maka tingkat capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2008 masih lebih baik atau mengalami peningkatan sebesar 6,76%.

3.13. Ketahanan Pangan

Undang-undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 memberikan defenisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Untuk mengukur capaian kinerja kunci implementasi urusan ketahanan pangan dinilai melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu :

- Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk.
- Regulasi ketahanan pangan

a. Ketersediaan Bahan Pangan (Beras)

Ketersediaan bahan pangan merupakan indikator capaian kinerja yang digunakan untuk urusan ketahanan pangan. Untuk mengukur ketersediaan bahan pangan per 1000 penduduk dilakukan dengan cara membagi rata-rata jumlah ketersediaan (stok) pangan utama pertahun dengan jumlah penduduk.

Pada tahun 2008, rata-rata stok pangan (beras) pertahunnya di Kota Medan mencapai 191.399.000 Kg, sedangkan jumlah penduduk Kota Medan pada tahun yang sama sebanyak 2.102.105 jiwa, sehingga rata-rata stok beras pertahun per 1000 orang sebesar 91,05 Kg. Dengan demikian tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator ketersediaan bahan pangan per 1000 penduduk di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 91,05 Kg. Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, ketersediaan bahan pangan di Kota Medan pada tahun 2008 mengalami penurunan sedikit dari 91,88 kg per 1000 penduduk.

b. Regulasi Ketahanan Pangan

Mengingat peranan sektor pertanian di Kota Medan yang tidak begitu besar dan Kota Medan juga bukan sebagai sentra pangan di Propinsi Sumatera Utara, maka regulasi ketahanan pangan adalah menjadi kepentingan bersama dari berbagai wilayah terutama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, regulasi ketahanan pangan di Kota Medan belum diatur secara khusus, namun tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

3.14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan pola keluarga kecil berkualitas dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan keluarga berencana menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan keluarga berencana ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Keluarga Berencana
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- Program Pelayanan Kontrasepsi
- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
- Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DAK)
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tersebut, penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar

Rp. 8.333.752.770,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.518.048.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 11.713.333.780,-

Untuk mengetahui indikator capaian kinerja kunci bagi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera digunakan 2 (dua) indikator pokok, yaitu :

- Tingkat prevalensi peserta KB aktif.
- Keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I.

a. Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif

Tingkat prevalensi peserta KB aktif dinilai berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur. Di Kota Medan pada tahun 2008 terdapat 314.366 pasangan usia subur (PUS) dan sebanyak 199.860 pasangan usia subur menjadi peserta KB secara aktif. Berdasarkan data tersebut maka tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator prevalensi peserta KB aktif di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 63,58% sehingga tingkat capaian kinerja tahun 2008 tersebut relatif sama dengan tingkat capaian tahun 2007 yang mencapai 63,84 %.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan peserta KB aktif di Kota Medan adalah melalui peningkatan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, menyelenggarakan Tim KB keliling, melaksanakan kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan dan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan serta menyelenggarakan bulan bhakti KB IBI.

Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga melakukan penyuluhan KB melalui media elektronik melalui 6 radio siaran swasta nasional yang ada di Kota Medan dengan masing-masing radio menyiarkan 10 kali kegiatan dan penyuluhan melalui 2 media cetak yang ada di Kota Medan, yaitu Harian Waspada dan Suara Sumut untuk masing-masing 1 kali kegiatan serta melakukan orientasi dan pertemuan untuk meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB dan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan 1 angkatan dengan peserta 400 orang dan 5 orang sebagai penyaji makalah.

b. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Penyelenggaraan program keluarga sejahtera lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting pemberdayaan keluarga untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahun 2008, jumlah keluarga yang ada di Kota Medan diperkirakan sebanyak 433.633 keluarga dan dari jumlah tersebut sebanyak 104.849 KK adalah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

Berdasarkan rasio tersebut maka tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Medan pada tahun 2008 adalah 24,17% dan apabila dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2007 yang mencapai 24,15% maka tingkat capaian kinerja tahun 2008 relatif hampir sama dengan tingkat capaian kinerja keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada tahun 2007.

3.15. Perhubungan

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan pusat-pusat kegiatan di wilayah perkotaan yang diikuti dengan pesatnya pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi. Oleh karenanya, dibutuhkan sarana dan prasarana perhubungan/jasa transportasi yang memadai untuk dapat memobilisasi penduduk yang semakin padat dan dinamis.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan perhubungan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan perhubungan ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi tersebut, maka penyelenggaraan urusan perhubungan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 20.037.429.249,- dan belanja langsung sebesar Rp. 27.700.740.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 41.818.118.955,-.

Indikator kinerja kunci untuk urusan perhubungan dinilai dari jumlah angkutan darat dibanding dengan jumlah penumpang angkutan darat. Pada tahun 2008, jumlah angkutan darat di Kota Medan sebanyak 32.367 armada dengan jumlah penumpang sebanyak 730.160 orang. Berdasarkan rasio tersebut, tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator jumlah angkutan darat dibanding dengan jumlah penumpang di Kota Medan adalah sebesar 4,43% sehingga tingkat capaian kinerja tahun 2008 ini mengalami peningkatan dari tahun 2007 yang mencapai 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 ketersediaan angkutan darat di Kota Medan relatif meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk di Kota Medan.

Dalam rangka menyediakan jasa transportasi yang baik, efisien dan efektif maka diperlukan adanya perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait. Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Medan melaksanakan kegiatan peningkatan disiplin untuk angkutan darat melalui penertiban terminal liar, penataan perparkiran dan pengaturan angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta menyelenggarakan pemilihan dan pemberian penghargaan kepada sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan se-Kota Medan.

3.16. Komunikasi dan Informatika

Dunia komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat menakjubkan di era global seperti saat ini. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi bahkan sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, bahkan kini cenderung menjadi kebutuhan primer manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga telah berkembang dengan pesat.

Sebagai kewajiban otonomi, maka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
- Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Dalam rangka mendukung implementasi program dan kegiatan komunikasi dan informasi tersebut, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika Kota Medan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.985.050.652,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.754.358.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 3.168.690.058,-.

Untuk mengetahui tingkat capaian indikator kinerja kunci implementasi urusan komunikasi dan informatika diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu :

- Web site milik pemerintah Daerah.
- Jumlah Pameran/Expo.

a. Web Site Milik Pemerintah Daerah

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi bagian penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Secara nyata penggunaan teknologi memiliki kemampuan untuk menjembatani komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah secara lebih efektif dan efisien serta mampu membentuk opini publik, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dalam rangka memperlancar arus komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama untuk mengakses aspirasi masyarakat, maka

Pemerintah Kota Medan sejak tahun 2005 sudah memiliki web site dengan nama www.pemkomedan.co.id. Hal ini berarti capaian kinerja kunci untuk indikator web site milik pemerintah daerah sudah ada dan untuk memelihara dan mengupdate berita perkembangan dan pembangunan Kota Medan maka dibentuk Tim Redaksi Website Pemko Medan sebanyak 21 orang.

b. Jumlah Pameran/Expo

Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008 telah melaksanakan pameran/expo sebanyak 5 kali. Kegiatan pameran/expo ini melalui penyelenggaraan pameran Ramadhan Fair pada bulan Ramadhan, Medan Fair di Tapian Daya Medan yang dilaksanakan 2 kali setahun, Syariah Fair yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membumikan sistem perbankan syariah di Kota Medan dan pameran UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produ-produk UMKM serta pameran pendidikan yang bertujuan untuk memperluas akses informasi tentang perkembangan pendidikan di Kota Medan.

Berdasarkan jumlah pameran/expo yang telah diselenggarakan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008 maka tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator jumlah pameran/expo sebanyak 5 kali.

3.17. Pertanahan

Pengelolaan urusan pertanahan lebih ditekankan pada pengendalian pemanfaatan tanah melalui perizinan dan penataan. Pada tahun 2008, luas wilayah Kota Medan adalah 26.510 Ha dengan luas lahan yang bersertifikat sebesar 131.574 Ha, sehingga tingkat capaian kinerja untuk indikator luas lahan bersertifikat sebesar 49,63%. Dibandingkan tahun 2007, luas lahan bersertifikat di Kota Medan tahun 2008 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2007 yang mencapai sekitar 24,42% dari luas wilayah Kota Medan. Selanjutnya pada tahun 2008, realisasi pembuatan sertifikat tanah di Kota Medan sebanyak 8.266 sertifikat untuk hak milik, 2.214 sertifikat untuk hak guna bangunan dan 7 sertifikat untuk hak pakai serta 8.979 sertifikat untuk hipotek.

Sementara itu, permasalahan tanah adalah suatu yang pelik yang sering terjadi terutama berkaitan dengan tanah negara. Selama tahun 2008,

BPN Kota Medan telah menyelesaikan 1 kasus tanah negara dari total 12 kasus yang masuk. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator penyelesaian kasus tanah negara di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 8,3% dan penyelesaian kasus tanah negara yang bermasalah tahun 2008 semakin sedikit yang mampu diselesaikan dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 13 kasus dari 70 kasus yang masuk atau tingkat capaian kinerjanya sekitar 18,6%.

Sedangkan untuk penyelesaian ijin lokasi yang diperuntukan di Kota Medan selama tahun 2008 mencapai 100%. Hal ini didasarkan pada rasio antara jumlah ijin lokasi dengan permohonan ijin lokasi. Dimana untuk jumlah ijin lokasi di Kota Medan yang disetujui sebanyak 1 ijin, sedangkan yang mengajukan permohonan ijin lokasi di Kota Medan sebanyak 1 ijin.

3.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Arus globalisasi dan dampak krisis multidimensi dapat menjadi peluang terjadinya konflik yang bernuansa pada disintegrasi sosial dan meningkatnya gangguan ketenteraman dan ketertiban sosial bila tidak bisa dicegah dan dikendalikan. Oleh karena itu, pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan kota pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan
- Program Pengembangan Kawasan Kebangsaan
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

- Program Politik Masyarakat
- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.157.394.806,- dan belanja langsung sebesar Rp. 17.344.285.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 10.335.699.654,-

Untuk mengetahui indikator capaian kinerja kunci pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, diukur melalui 3 (tiga) indikator pokok, yaitu :

- Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah.
- Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

a. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

Pada tahun 2008, pembinaan politik secara formal tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dan hanya melakukan pendataan partai politik yang ikut menjadi peserta pemilu 2008. Namun demikian, dalam berbagai kesempatan seperti pertemuan/rapat partai politik dan dialog politik, Pemerintah Kota Medan tetap memberikan saran dan harapan untuk senantiasa menciptakan kondisi keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat, sekaligus mendorong kehidupan demokrasi yang konstruktif.

Dalam rangka membangun pemahaman bersama dengan partai politik tentang tata cara pengajuan dan penggunaan bantuan keuangan oleh partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Medan, Pemerintah Kota Medan membentuk tim penelitian dan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi untuk pengajuan penyerahan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik yang terdaftar di Kota Medan dan partai politik peserta pemilu tahun 2008.

b. Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Kota Medan, maka peranan keompok-kelompok masyarakat dalam berbagai wadah organisasi seperti organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun organisasi kepemudaan (OKP) dirasakan sangat penting dan strategis selama tahun 2008.

Pola kemitraan yang dikembangkan Pemerintah Kota Medan dilakukan secara berkesinambungan melalui kehadiran pejabat Pemerintah Kota Medan seperti pada acara pemilihan pengurus dan pelantikan pengurus baru. Kemitraan yang terarah dilakukan untuk meningkatkan harmonisasi dan kerukunan yang saling menghargai serta menambah wawasan kebangsaan diantara partai politik/ormas.

3.19. Otonomi Daerah

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah menjadikan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka perlu adanya penataan ulang berbagai elemen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka manifestasi pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan otonomi daerah menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan otonomi daerah ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.395.867.281,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 2.932.304.635,-.

Untuk mengetahui capaian kinerja kunci pelaksanaan urusan otonomi daerah, diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu :

- Jumlah sistem informasi manajemen pemerintah daerah.
- Indeks kepuasan layanan masyarakat.

a. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota

Sampai saat ini, Pemerintah Kota Medan telah menerapkan 4 (empat) sistem informasi manajemen, yakni sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), sistem informasi keuangan daerah (SIMDA), SIM Anggaran dan SIM PBB. Namun demikian, penilaian terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya dapat diketahui.

Berdasarkan data tersebut maka tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah sistem informasi manajemen pemerintah daerah pada tahun 2008 mencapai 4 buah.

b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Medan belum melaksanakan survey kepuasan layanan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari aparatur penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Pemerintah Kota Medan.

3.20. Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu metode pembangunan partisipatif yang bertujuan mewujudkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Sasaran pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.

Sebagai kewajiban otonomi, maka penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pemanfaatan Pengembangan Sistem Pelaporan
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
6. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Sebagai upaya meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.395.867.281,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 2.932.304.635,-.

Tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui 3 (tiga) indikator pokok, yaitu :

1. Persentase jumlah PKK aktif.
2. Persentase Posyandu.

a. Persentase Jumlah PKK Aktif

Berdasarkan data tahun 2008, terdapat 172 PKK di seluruh Kota Medan dan semuanya merupakan PKK aktif yang secara berkelompok melakukan kegiatan produktif secara berkesinambungan. Salah satu pendorong tingginya keaktifan PKK di Kota Medan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam hal :

- Menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan bagi kader penyuluh PKK lapangan dan ketua-ketua kelompok PKK.
- Melaksanakan penyuluhan bagi kader PKK lapangan dengan ketua kelompok PKK.
- Melaksanakan pembinaan bagi kelurahan percontohan PKK untuk kelurahan sepanjang jalan protokol.
- Menyelenggarakan pelatihan kepada warga binaan di bidang memasak dan menjahit dengan tujuan untuk menghindari 3 R (rawan ekonomi, rawan pendidikan dan rawan kesehatan).
- Terselenggaranya peringatan hari kesatuan gerak PKK dengan tujuan untuk memperingati hari ulang tahun PKK.
- Telah tersusunnya kerangka acuan program kerja tahunan PKK dengan tujuan agar tercipta perencanaan yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan PKK di setiap tingkatan pada tahun 2009.
- Terpenuhinya dana operasional bagi Tim Penggerak PKK Kota Medan tahun 2008 sebagai sarana pendukung kinerja PKK Kota Medan.
- Terlaksananya study wisata ke Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk menambah wawasan anggota PKK Kota Medan dan staf BPM Kota Medan dalam memajukan PKK pada masa mendatang.

b. Persentase Posyandu

Sejalan dengan peningkatan kualitas kegiatan PKK di tingkat kelurahan dan kecamatan, maka keberadaan Tim Penggerak PKK menjadi sangat strategis dalam menggerakkan dan menjalankan posyandu, sehingga upaya mengatasi masalah kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas SDM masyarakat dapat dimulai dari tingkat lingkungan. Program posyandu bertujuan untuk memberikan akses bagi pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui.

Untuk menilai indikator capaian kinerja kunci urusan posyandu diukur berdasarkan rasio antara jumlah posyandu aktif dengan total posyandu. Pada tahun 2008, jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kota Medan berjumlah 1.405 dan semua posyandu yang

ada di Kota Medan merupakan posyandu aktif. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja kunci untuk indikator persentase posyandu di Kota Medan pada tahun 2008 mencapai 100%.

3.21. Sosial

Arah pembangunan kota untuk urusan sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Secara nasional kondisi kesejahteraan sosial masyarakat menghadapi persoalan yang memerlukan perhatian ekstra agar persoalan tersebut secara bertahap dapat ditekan melalui program – program yang berkesinambungan.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan sosial menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan sosial ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Program Pembinaan Anak Terlantar
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, maka penyelenggaraan urusan sosial selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 943.931.502,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 1.022.036.500,-** dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar **Rp. 1.475.412.400,-**.

Tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan sosial, diukur melalui 3 (tiga) indikator pokok, yaitu :

- Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti sosial penyandang cacat , panti sosial korban narkoba dan rumah singgah.
- Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.

a. Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Sosial Penyandang Cacat, Panti Sosial Korban Narkotika dan Rumah Singgah

Dalam tahun 2008, Kota Medan memiliki sebanyak 69 buah sarana sosial yang terdiri dari 37 buah panti sosial anak terlantar (panti asuhan), 1 panti sosial lanjut usia (panti jompo), 4 buah panti sosial penyandang cacat, 5 buah panti sosial korban narkotika dan 22 buah rumah singgah.

Berdasarkan data tersebut, maka tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti sosial penyandang cacat, panti sosial korban narkotika dan rumah singgah di Kota Medan pada tahun 2008 mencapai 69 buah dan mengalami peningkatan dari tahun 2007 yakni untuk 2 buah panti sosial anak terlantar (panti asuhan).

b. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pada tahun 2008, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Medan seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih menjadi persoalan yang selalu dihadapi setiap tahunnya. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada.

Selama tahun 2008, PMKS yang dibina dan ditangani oleh Pemerintah Kota Medan sebanyak 378 orang. Sedangkan jumlah PMKS yang ada di Kota Medan selama tahun 2008 diperkirakan sebanyak 252.283 orang. Berdasarkan indikator tersebut, maka tingkat capaian kinerja untuk penanganan penyandang masalah sosial ini baru mencapai sekitar 0,15%.

Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas masalah PMKS di Kota Medan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan Kota Medan sebagai Kota Metropolitan. Walaupun ketersediaan tempat/fasilitas yang digunakan untuk penanganan masalah sosial

terus bertambah akan tetapi tidak sepenuhnya mampu menjadikan permasalahan sosial dapat ditekan. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan PMKS adalah :

- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dunia kewirausahaan dan praktek berbagai kreasi sulaman serta bordir bagi keluarga miskin di Kota Medan yang diikuti 30 orang peserta dari 3 KUBE (KUBE Sehati, KUBE Bersama dan KUBE Jerima).
- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan anak terlantar bagi 30 peserta dengan memberikan pelatihan kreasi daur ulang barang bekas, pembuatan gerabah dan pembuatan pupuk kompos.
- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kepada 30 orang penyandang cacat tuna rungu berupa pelatihan kreasi gerabah, daur ulang barang bekas dan kreasi jahitan payet/manik-manik.
- Melakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan (tes HIV/AIDS) kepada 40 orang PSK dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan PSK akan resiko pekerjaannya sehingga diharapkan dapat meninggalkan aktivitasnya sebagai PSK.
- Melakukan pembinaan kepada 35 orang anak jalanan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran anak jalanan sehingga tidak lagi hidup di jalanan dan kembali kepada keluarganya.
- Melakukan penyuluhan tentang resiko hidup di jalanan kepada 20 orang gelandangan dan pengemis serta melakukan tes kesehatan (cek HIV/AIDS).

c. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Salah satu penyelenggaraan urusan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kota Medan adalah melalui kegiatan penanggulangan masalah sosial dengan sasaran meningkatnya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator jumlah PMKS yang menerima bantuan dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Pada tahun 2008, jumlah PMKS yang diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota Medan sebanyak 378 orang, sedangkan PMKS yang seharusnya menerima bantuan berjumlah 252.283 orang. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat capaian kinerja untuk

penanganan PMKS yang memperoleh bantuan hanya sekitar 0,15%. Walaupun jumlah PMKS yang menerima bantuan relatif kecil, tetapi Pemerintah Kota Medan terus melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan penyuluhan tentang PMKS kepada 151 aparaturnya kelurahan se-Kota Medan yang dibagi dalam 2 angkatan dan mensosialisasikan UU perlindungan anak serta penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan hal lain yang terkait dengan perlindungan anak yang diikuti oleh 21 orang aparaturnya kecamatan.

3.22. Budaya

Budaya sebagai hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat atau daerahnya adalah merupakan kekayaan sekaligus ciri yang membedakan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Pembangunan urusan kebudayaan diarahkan pada terpeliharanya kelestarian dan pembudayaan seni budaya dengan menumbuhkembangkan budaya-budaya lokal serta peningkatan kerukunan antar umat beragama.

Sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya lokal, maka penyelenggaraan urusan budaya selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.108.884.117,- dan belanja langsung sebesar Rp. 8.115.528.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 8.334.226.372,-.

Tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan budaya diukur melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu :

- Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya.
- Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya.
- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

a. Banyaknya Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Selama tahun 2008, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 17 kali, yaitu di dalam negeri sebanyak 11 (sebelas) kali dan di luar negeri sebanyak 6 (enam) kali, dengan menampilkan berbagai keragaman yang ada dan menjadi ciri khusus Kota Medan. Penyelenggaraan seni budaya berlangsung secara simultan, seperti pelaksanaan Imlek Moment di kawasan Merdeka Walk

yang merupakan salah satu event religius dari Umat Budha yang sangat antusias diminati oleh etnis Tionghoa.

Selain itu, juga kegiatan Karnaval Budaya, perlombaan Kendaraan Antik dan Sepeda Tua yang mengambil titik start di Istana Maimun, mengadakan lomba puisi dan penyair di Taman Budaya Medan, menyelenggarakan Medan Fair dan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang diadakan 2 kali dalam setahun, menyelenggarakan Festival Budaya Islam dan Ramadhan Fair pada bulan Ramadhan yang diselenggarakan di Taman Sri Deli Medan serta kegiatan Cristmas Season.

b. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya, tentunya membutuhkan ketersediaan sarana yang representatif. Pada tahun 2008, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kota Medan sebanyak 150 buah yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Medan. Oleh karenanya, tempat penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Medan tidak menjadi hambatan guna mendorong dan mempromosikan seni dan budaya lokal yang ada di Kota Medan.

c. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting sehingga untuk mendukung pengawasan terhadap benda cagar tersebut telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan yang Bernilai. Di samping itu, berdasarkan Sejarah Arsitektur Keperbukalaan Daerah Kotamadya Tingkat II Medan dan SK Walikota Kepala Daerah Tingkat II Nomor 188.342/382/SK/89 tanggal 12 April 1989 tentang pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 1988 yang menyatakan bahwa bangunan sejarah yang dilestarikan sebanyak 42 buah.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan jumlah benda, situs dan kawasan yang dimiliki suatu daerah.

Berdasarkan data yang ada tahun 2008, jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 42 buah. Hal ini didasari oleh Sejarah Arsitektur Kepurbakalaan dan SK Walikota Kepala Daerah Tingkat II Nomor 188.342/382/SK/89 tanggal 12 april 1989 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 1988 yang menyatakan bahwa bangunan sejarah yang dilestarikan sebanyak 42 buah. Namun demikian, jumlah benda, situs dan kawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2008 sebanyak 106 buah. Berdasarkan data tersebut tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sekitar 39,62%.

3.23. Statistik

Kebutuhan akan data statistik menjadi mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan dengan data-data ekonomi dan sosial yang dapat digunakan sebagai kajian evaluasi atas keberhasilan pembangunan sekaligus digunakan dalam perencanaan pembangunan. Publikasi dalam bentuk buku yang menjadi informasi penting bagi berbagai *stakeholder* adalah Buku Medan Dalam Angka dan analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan. Berkaitan dengan data statistik tersebut, Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan telah menyusun buku Medan Dalam Angka Tahun 2008 dan penyusunan buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan Tahun 2008.

3.24. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan bertujuan untuk melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan sasaran meningkatnya tertib administrasi pemerintahan yaitu SKPD/unit kerja yang menerapkan sistem kearsipan pola baru.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan kearsipan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan kearsipan ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sebagai upaya untuk meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, maka penyelenggaraan urusan kearsipan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.329.984.910,- dan belanja langsung sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.286.478.836,-.

Tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan kearsipan diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu :

- Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku.
- Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan.

a. Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

Tingkat capaian kinerja pada indikator penerapan pengelolaan arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah SKPD yang ada. Berdasarkan data tahun 2008, memperlihatkan bahwa persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku telah dilaksanakan oleh 40 SKPD dari 61 SKPD yang ada. Sehingga tingkat capaian kinerja untuk indikator penerapan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Medan mencapai sekitar 65%.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2007, ternyata tingkat capaian kinerja tahun 2008 tidak mengalami perubahan atau penambahan SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Hal ini menunjukkan masih terdapat 21 SKPD atau 35% yang belum melakukan reformasi terhadap pengelolaan arsip secara baku di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

b. Jumlah Kegiatan Pembinaan Petugas Pengelola Pengarsipan

Untuk lebih memaksimalkan tugas kearsipan, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan pembinaan petugas pengelola kearsipan dengan

10 kegiatan. Berdasarkan data tersebut, tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan di Kota Medan pada tahun 2008 mencapai 10 kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan pembinaan petugas pengelola kearsipan adalah melakukan kajian tentang sistem administrasi kearsipan dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan arsip dan pemusnahan arsip dari berbagai SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Selama tahun 2008 juga dilaksanakan sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara tentang kearsipan.

3.25. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kota Medan. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

Sebagai kewajiban otonomi maka penyelenggaraan urusan perpustakaan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan perpustakaan ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, maka penyelenggaraan urusan perpustakaan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 702.414.460,- dan belanja

langsung sebesar Rp. 772.032.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.397.706.231,-.

Tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan perpustakaan diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu :

- Keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.
- Rasio jumlah pengunjung perpustakaan.

a. Keberadaan Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Capaian kinerja pada tahun 2008 untuk indikator keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Medan berkisar 34,17%. Hal ini berdasarkan pada rasio antara jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah yang mencapai 9.726 judul dengan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 28.464 eksemplar. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan tahun 2007, tingkat capaian kinerja tahun 2008 mengalami peningkatan walaupun relatif kecil dari 33,37% pada tahun 2007.

Sampai saat ini jumlah koleksi buku yang tersedia tersebut pada perpustakaan daerah relatif masih sedikit dan belum memenuhi kebutuhan pemustaka. Untuk itu, Pemerintah Kota Medan dalam tahun 2008 melakukan penambahan dan pengadaan bahan pustaka untuk perpustakaan umum daerah sebanyak 1.500 eksemplar dan bahan perpustakaan daerah sebanyak 800 eksemplar serta penambahan bahan pustaka bagi kelurahan sebanyak 800 eksemplar di 10 kelurahan.

b. Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pada indikator jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Medan digunakan rasio antara jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Dari data yang tersedia di perpustakaan umum daerah menunjukkan bahwa jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah di Kota Medan sebanyak 3.952 kali selama setahun. Sedangkan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani adalah 60.800 orang.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Medan masih sangat minim, yaitu

sekitar 6,5 %. Tetapi tingkat capaian kinerja tahun 2008 tersebut relatif meningkat dibandingkan tahun 2008 yang baru mencapai sekitar 0,5%. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan masih belum menyadari sepenuhnya akan pentingnya keberadaan sebuah perpustakaan umum dan masih rendahnya minat baca di kalangan siswa sekolah. Hal ini berdasarkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan/letak perpustakaan umum daerah Kota Medan yang hanya mencapai 25% dari jumlah penduduk Kota Medan serta masih rendahnya minat baca di kalangan siswa sekolah yang hanya mencapai 20% dari jumlah siswa yang ada di Kota Medan pada tahun 2008.

Untuk mengatasi fenomena tersebut, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan adalah kegiatan supervisi pembinaan dan stimulasi perpustakaan di 50 kelurahan, melakukan penyuluhan minat dan kebiasaan membaca pada siswa/i SLTP dan SLTA di 40 sekolah di Kota Medan, melakukan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca melalui media elektronik sebanyak 120 kali siaran di radio dan pemasangan spanduk pada 21 kecamatan di Kota Medan serta melakukan layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat dan sekolah yang berada di lingkaran luar Kota Medan.

Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar menjadi urusan pilihan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 1.986.118.410,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.632.192.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 5.195.072.224,-.

Sebagai kewajiban otonomi, maka penyelenggaraan urusan perikanan dan kelautan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan pada tahun 2008. Secara operasional, penyelenggaraan urusan perikanan dan kelautan masyarakat ini dituangkan dalam beberapa program pokok, antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatuer
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Program Peningkatan Promosi dan Investasi

Tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan pilihan perikanan dan kelautan diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu :

- Jumlah produksi perikanan.
- Jumlah rata-rata konsumsi ikan.

a. Jumlah Produksi Ikan

Capaian kinerja pada indikator jumlah produksi ikan didasarkan pada perbandingan antara jumlah produksi ikan dengan target daerah. Berdasarkan data tahun 2008, sekitar 96,5% produksi ikan dapat dicapai dari total target yang diharapkan. Dimana total produksi ikan sebesar 68.976 ton, sedangkan target produksi ikan yang diharapkan hanya mencapai 71.496 ton pada tahun 2008. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah produksi ikan di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 96,5% dan capaian kinerja tahun 2008 ini relatif tidak berbeda jauh dengan capaian kinerja tahun 2007.

Secara umum, produksi ikan tersebut belum secara signifikan mempengaruhi secara langsung peningkatan produksi ikan, terutama pada produksi perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan wilayah dan wewenang kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan masih dibatasi oleh beberapa institusi lain. Di samping itu, masih belum berjalannya sistem pelelangan ikan di Kota Medan dan hampir di seluruh wilayah perikanan dan kelautan di Sumatera Utara.

Upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi ikan diantaranya dengan menyediakan satu unit dermaga di Kelurahan Nelayan Indah guna mendukung aktifitas nelayan bongkar muat dan pemasaran hasil tangkapan, menyediakan alat tangkap berupa jaring kumbang dan pukat sambung serta perlengkapan alat bantu pemasaran dan menyediakan GPS sebanyak 20 unit sebagai alat bantu penangkapan ikan untuk nelayan.

Selain itu, untuk meningkatkan produksi ikan terutama perikanan budidaya maka Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan budidaya air tawar dan pengolahan ikan untuk anggota PTP2WKSS di Kelurahan Percontohan di Kota Medan, melaksanakan demplot budidaya air payau sebagai upaya peningkatan mutu hasil perikanan dengan menyediakan dana sebagai operasional BBI di kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan dan menyediakan saprodi bagi budidaya udang di Kelurahan Sicanang serta melaksanakan kegiatan pelatihan pasca panen bagi kelompok pengolah hasil perikanan dan nelayan.

b. Jumlah Rata-Rata Konsumsi Ikan

Pada tahun 2008, rata-rata konsumsi ikan/kg/kapita/tahun masyarakat Kota Medan diperkirakan sekitar 92,70 kg/orang/tahun. Hal ini didasarkan pada rasio antara jumlah konsumsi ikan dengan target daerah. Untuk tahun 2008, jumlah konsumsi ikan di Kota Medan sebesar 24,10 kg/orang/tahun, sedangkan target daerah sebesar 26,01 kg/orang/tahun. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah rata-rata konsumsi ikan di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 92,70% dan pencapaian kinerja tahun 2008 relatif tidak berbeda jauh dengan tingkat capaian kinerja tahun 2007.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk mempromosikan dan meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat Kota Medan adalah melalui sosialisasi gemar mengkonsumsi ikan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu, Pemerintah Kota Medan mempromosikan hasil-hasil

perikanan dengan mengikutsertakan pada acara Medan Fair, PRSU dan Hari Nusantara sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran produk ikan Kota Medan.

2. Pertanian

Kebijakan pembangunan Kota di bidang pertanian, selama tahun 2008 lebih diarahkan kepada optimalisasi sumber-sumber daya pertanian melalui intensifikasi sumber daya pertanian. Walaupun Kota Medan merupakan wilayah perkotaan yang memiliki lahan pertanian yang semakin sempit, namun pertanian menjadi urusan pilihan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan. Hal ini terkait dengan target pemerintah mewujudkan swasembada beras dan kesinambungan ketersediaan dan ketahanan pangan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi sumber-sumber daya pertanian, maka penyelenggaraan urusan pilihan pertanian selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.402.793.871,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.536.106.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 4.293.393.386,-.

Untuk menilai tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan pilihan pertanian dapat diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu :

- Produktivitas padi per hektar.
- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

a. Produktivitas Padi per Hektar

Pada umumnya, pertanian identik dengan pertanian tanaman pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok pangan seperti beras, jagung dan ubi kayu. Berdasarkan data tahun 2008, produksi tanaman padi di Kota Medan sebesar 17.618 ton dengan luas areal tanaman padi 3,855 Ha sehingga tingkat produktivitas padi per hektar di Kota Medan sebesar 4,5 ton/Ha. Berdasarkan data produktivitas tersebut maka tingkat capaian kinerja produktivitas padi per hektar tahun 2008 relatif sama dengan tahun 2007.

Kondisi ini menunjukkan bahwa luasnya lahan pertanian tanaman pangan terutama padi di Kota Medan tidak signifikan dengan hasil

produksinya. Hal ini dikarenakan perilaku para petani yang menganggap bahwa bercocok tanam sebagai pekerjaan sampingan sehingga tidak menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat petani di Kota Medan. Namun demikian, Pemerintah Kota Medan tetap berupaya melakukan program nasional dalam bentuk Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan mengamankan mekanisme penyaluran benih padi sebanyak 28.780 Kg kepada petani, sehingga pertanian tanaman pangan relatif mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan masyarakat sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Ketersediaan bahan pangan di Kota Medan mencapai 9.105/1.000 penduduk.

b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Dilihat dari luasnya areal lahan pertanian dan hasil-hasil produksinya maka sumbangan sektor pertanian (termasuk perikanan/kelautan) sebesar 2,86% terhadap pembentukan PDRB Kota Medan. Hal ini didasarkan pada rasio antara nilai PDRB sektor pertanian dengan nilai total PDRB Kota Medan pada tahun bersangkutan. Pada tahun 2008, nilai PDRB sektor pertanian Kota Medan sebesar Rp. 1.870,62 juta, sedangkan nilai total PDRB sebesar Rp. 65.221,77 juta. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Medan sebesar 2,86% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,14% pada tahun 2007.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian di Kebun Bibit Binjai Amplas dan Laboratorium Kultur Jaringan dengan jumlah produksi bibit sebanyak 5.025 polybag, pengadaan bibit sebanyak 1.100 polybag dan yang sudah disalurkan sebanyak 2.038 polybag serta menyediakan bibit unggul sebanyak 1.000 pohon yang terdiri dari pohon melinjo dan mangga yang telah didistribusikan di Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Polonia dan Medan Amplas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian di Kota Medan.

Selain itu, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan pameran berupa promosi pertanian/peternakan di Taman Ahmad Yani dengan 2 kali pelaksanaan, yakni pameran I tanggal 22 Mei s/d 23 Juni 2008 dan pameran II tanggal 28 Juli s/d 27 Agustus 2008, melaksanakan Pasar Tani pada tanggal 21 s/d 25 Agustus 2008 di halaman kantor Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara dan menyelenggarakan Medan Fair pada tanggal 5 s/d 21 Desember 2008 di Paviliun PEMKO Medan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah pemasaran hasil produk pertanian dan untuk meningkatkan pendapatan petani tanaman hias serta memperkenalkan berbagai macam produksi tanaman hias kepada masyarakat.

3. Pariwisata

Sebagai Kota Metropolitan yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura, maka pariwisata merupakan urusan pilihan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan. Hal ini didasarkan bahwa promosi wisata tidak lagi diorientasikan pada aktivitas pameran produk wisata tetapi lebih disinergiskan sebagai bagian dari promosi produk-produk kerajinan daerah, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya.

Tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan pilihan pariwisata dapat diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu :

- Jumlah kunjungan wisata.
- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

a. Jumlah Kunjungan Wisata

Pada tahun 2008, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Medan mencapai 152.494 orang wisatawan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2007 yang datang ke Kota Medan sebanyak 135.322 orang wisatawan, maka pada tahun 2008 mengalami peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 12,69%.

Sebagai upaya untuk menumbuhkan minat wisatawan untuk datang ke Kota Medan, maka Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya :

1. Memperbaiki objek wisata dengan cara pengecatan Istana Maimun, Kuil Cong Afie dan Penangkaran Buaya.
2. Menyelenggarakan berbagai event untuk menggairahkan sektor pariwisata seperti event Medan sebagai Kota Tua yang bekerja sama dengan Badan Warisan Sejarah.
3. Event pemilihan Jaka Dara Kota Medan yang Menampilkan juara 1 sebagai perwakilan Kota Medan dalam pemilihan duta wisata.
4. Menyelenggarakan atraksi kesenian dan budaya yang dilaksanakan pada lokasi objek daya tarik wisata, seperti Merdeka Walk, Rumah Cong Afie, Istana Maimun dan Penangkaran Buaya Asam Kumbang.
5. Promosi pariwisata di dalam negeri, seperti keikutsertaan pada event Sriwijaya Fair (Palembang), Gebyar Wisata (Jakarta), Travel Fair (Jakarta) dan Jakarta Fair.
6. Untuk mendorong wisatawan lokal sekaligus mencari investor bagi wisata bahari maka diselenggarakan lomba perahu hias, lomba perahu dayung, lomba layang-layang dan lomba memancing di danau Siombak Kecamatan Medan Marelan.

b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Sektor pariwisata tidak terlepas dari kebutuhan akomodasi seperti hotel atau penginapan maupun restoran. Dengan mempertimbangkan penggunaan jasa hotel dan akomodasi yang ada, maka besarnya kontribusi sektor pariwisata pada sub sektor hotel, restoran dan akomodasi terhadap PDRB Kota Medan sebesar 2,55%. Besarnya kontribusi sektor pariwisata didasarkan pada rasio antara nilai sektor pariwisata yang mencapai Rp. 1.662,55 juta dengan total PDRB Kota Medan sebesar Rp. 65.221,77 juta. Berdasarkan data tersebut, tingkat capaian kinerja untuk indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Medan sebesar 2,55% dan cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang berkontribusi sebesar 4,95%.

4. Industri dan Perdagangan

Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan Kota Medan yang ikut berperan dalam mendorong pembangunan. Sebagai suatu wilayah

dengan status ibu kota propinsi, maka sektor industri diarahkan menjadi tulang punggung ekonomi daerah selain sektor-sektor unggulan lainnya. Industrialisasi yang cenderung terjadi di Kota Besar, membuat industri menjadi salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian daerah, maka penyelenggaraan urusan pilihan industri Kota Medan selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.104.845.020,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.888.528.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 9.963.727.340,-.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan pilihan industri berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu :

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
- Produktivitas sektor industri.
- Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor.

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Dilihat dari perkembangan jumlah industri yang ada di Kota Medan pada tahun 2008 yang mencapai 11,05% menunjukkan bahwa kondisi perkembangan industri di Kota Medan cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Medan yang mencapai 15,97%. Besarnya kontribusi ini berdasarkan perbandingan antara nilai PDRB sektor industri Kota Medan yang mencapai Rp. 10.420,82 juta dengan total PDRB Kota Medan sebesar Rp. 65.221,77 juta.

Berdasarkan data tersebut, tingkat capaian kinerja untuk indikator kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Medan sebesar 15,97% dan cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2007 yang mencapai sebesar 16,29%. Menurunnya kontribusi sektor industri tersebut dikarenakan dampak dari krisis global yang hampir melanda semua negara tidak terkecuali Indonesia, (Kota Medan).

Untuk mengatasi penurunan kontribusi sektor industri tersebut, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan Workshop Klaster CPO kepada 50 Pengusaha UKM dan menyelenggarakan pelatihan AMT bagi 20 pengusaha UKM dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengusaha UKM. Kegiatan ini diharapkan akan mampu meningkatkan motivasi para pengusaha UKM untuk mengembangkan usahanya sehingga UKM tersebut akan muncul sebagai industri yang tangguh dan mampu meningkatkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kota Medan di masa mendatang.

b. Produktivitas Sektor Industri

Capaian kinerja pada produktivitas sektor industri didasarkan pada rasio antara jumlah output sektor industri dengan total tenaga kerja. Berdasarkan data output sektor industri tahun 2008 yang mencapai Rp. 30.519.860,33 juta, sedangkan total tenaga kerja sebanyak 729.892 orang maka tingkat capaian kinerja produktivitas sektor industri sebesar Rp. 41,80 juta per orang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor industri mampu menghasilkan output industri sebesar Rp. 41,80 juta.

Berdasarkan data produktivitas sektor industri tersebut, capaian kinerja tahun 2008 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2007 yang tingkat kinerjanya baru sebesar Rp. 17,67 juta per orang. Peningkatan produktivitas ini menunjukkan gambaran bahwa sektor industri di Kota Medan cenderung semakin produktif dan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Kota Medan di masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor industri maka Pemerintah Kota Medan melakukan upaya pembinaan kepada UKM melalui penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) kepada 5 UKM dan pada tahun 2008 Kota Medan meraih juara 1 dalam Konvensi GKM tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini UKM dibina secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sistem pengolahan produksi sampai pada pengelolaan manajemen usahanya, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas UKM dan menghasilkan

pengusaha-pengusaha UKM yang tangguh sehingga memberikan kontribusi yang semakin meningkat dalam pembentukan PDRB Kota Medan dari sektor industri.

c. Kontribusi Ekspor Hasil Industri Terhadap Total Ekspor

Tingkat capaian kinerja pada indikator kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor adalah perbandingan antara jumlah ekspor hasil industri dengan jumlah total ekspor. Pada tahun 2008, total ekspor hasil industri Kota Medan sebesar US\$ 537.523 sedangkan total ekspor Kota Medan sebesar US\$ 7.430.151. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja kunci pada indikator kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 72,36%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2007 maka kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor Kota Medan tahun 2008 cenderung mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 18,28% dari tahun 2007 yang mencapai sebesar 54,08%. Peningkatan kontribusi ekspor ini membuktikan bahwa hasil-hasil industri Kota Medan semakin mendominasi pangsa ekspor Kota Medan dan menjadi primadona ekspor sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber devisa bagi negara di masa yang akan datang.

Untuk itu, Pemerintah Kota Medan terus berupaya untuk mendorong peningkatan ekspor hasil-hasil industri Kota Medan dengan melakukan sosialisasi tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada 50 pengusaha UKM yang ada di Kota Medan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengusaha UKM akan pentingnya SNI sehingga diharapkan akan semakin banyak pengusaha UKM di Kota Medan yang menerapkan SNI bagi produk-produk usahanya. Di samping itu, Pemerintah Kota Medan juga melakukan sosialisasi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada 50 pengusaha UKM dan mensosialisasikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pengusaha UKM akan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk urusan pilihan perdagangan merupakan bagian dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan di Kota Medan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Medan.

Tingkat capaian kinerja kunci untuk urusan pilihan perdagangan dapat diukur melalui 2 (dua) indikator utama , yaitu :

- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
- Ekspor bersih perdagangan.

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Besarnya kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2008 terhadap pembentukan PDRB Kota Medan sebesar 25,93%. Besarnya kontribusi ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah kontribusi PDRB sektor perdagangan dengan total PDRB Kota Medan. Berdasarkan data tahun 2008, besarnya nilai PDRB sektor perdagangan sebesar Rp. 16.917,91 juta, sedangkan total PDRB Kota Medan sebesar Rp. 65.221,77 juta. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB Kota Medan adalah 25,93% dan sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 yang berkontribusi sebesar 25,44%.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Medan maka Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan pameran promosi di dalam dan di luar negeri sebanyak 6 kali. Untuk pameran promosi di dalam negeri dilaksanakan sebanyak 5 kali, yaitu Pameran INACRAFT, Sumut Expo, Pekan Raya Jakarta, PRSU, INVESDA 2008, sedangkan untuk pameran promosi di luar negeri sebanyak 1 kali yaitu mengikuti pameran Penang Fair. Pameran ini dimaksudkan untuk memperkenalkan produk UKM ke pasar dalam negeri dan luar negeri sehingga diharapkan akan meningkatkan penjualan produk UKM dan memperluas jaringan pemasaran produk-produk UKM di dalam negeri dan luar negeri.

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Pada tahun 2008, total ekspor bersih perdagangan Kota Medan sebesar US\$ 4.368.546. Besarnya nilai ekspor bersih perdagangan ini

diperoleh dari selisih antara nilai ekspor Kota Medan yang mencapai US\$ 7.430.151 dengan nilai impor sebesar US\$ 3.061.603. Berdasarkan kondisi ini maka neraca perdagangan Kota Medan mengalami surplus perdagangan sebesar US\$ 4.368.546 dan sedikit mengalami peningkatan sekitar 5,76% dari tahun 2007, yang mencapai nilai ekspor bersih perdagangan sebesar US\$ 4.130.489. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi perekonomian Kota Medan semakin bergairah sehingga dapat mendorong peningkatan produk-produk yang berorientasi ekspor.

Untuk menggairahkan para pengusaha untuk menghasilkan produk-produk yang berorientasi ekspor maka Pemerintah Kota Medan melakukan sosialisasi manajemen ekspor kepada 50 pengusaha UKM dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan prosedur dan dokumen ekspor impor sehingga diharapkan akan semakin banyak pengusaha UKM yang berminat untuk memasuki pasar ekspor. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga menyediakan sistem dan jaringan informasi perindustrian dan perdagangan selama tahun 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan informasi bagi pengusaha terutama yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan.